

Forced Labour 2014 bahwa sekitar 150 milyar US Dollar berasal dari para pekerja yang di eksploitasi baik pekerja dari Negara Thailand sendiri maupun dari Negara lainnya. Adapula sektor – sektor yang tercakup pada eksplotasi manusia yang keuntungannya sangatlah besar seperti, eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga kerja paksa, pekerja rumah tangga dan agrikultur (ILO, 2014).

Adapun tabel yang berisi data – data terkait keuntungan yang di dapatkan dari eksploitasi menurut Organisasi Buruh Internasional dalam *Report, Profits, and Proverty : The Economic of Forced Labour* 2014 berikut di bawah ini :

Tabel 2. Estimasi keuntungan ilegal dari sektor – sektor eksploitasi menurut International Labour Organization (US Dollar)

Wilayah	Forced sexual exploitation	Domestic work	Non Domestic Labour	Total
Asia – Pasific	31.70 Billion	6.30 Billion	13.80 Billion	51.80 Billion
Latin America and the Carribbean	10.40 Billion	0.50 Billion	1.00 Billion	12.00 Billion
Africa	8.90 Billion	0.30 Billion	3.90 Billion	13.10 Billion

Middle East	7.50 Billion	0.40 Billion	0.60 Billion	8.50 Billion
Central and South – Eastern Europe and CIS	14.30 Billion	0.10 Billion	3.60 Billion	18.00 Billion
Developed Economies and Eu	26.20 Billion	0.20 Billion	20.50 Billion	46.90 Billion
World	99.00 Billion	7.90 Billion	43.40 Billion	150.20 Billion

Sumber data tabel di atas ini di dapatkan dari *International Labour Organization Report, Profits, and Proverty : The Economic of Forced Labour 2014*.

Berikut data table di atas yang di kemukakan oleh *International Labour Organization* dalam *Report, Profits, and Proverty : The Economic of Forced Labour 2014* yang mereka dapatkan dengan menggunakan tahun 2006 sebagai bahan acuan terkait kasus eksploitasi manusia per region tiap tahunny, dimana Asia – Pasifik memiliki peringkat kedua tertinggi dari data dunia sebesar 51.80 billion Dollars

Pada sekitar tahun 2006 seperti tertulis tabel di atas bahwasanya ada tiga macam eksploitasi yaitu eksploitasi tenaga kerja rumah tangga ilegal, eksploitasi seksual dengan paksa dan non – pekerja rumah tangga ilegal. korban yang dieksploitasi secara keseluruhan dari berbagai sektor di seluruh

dunia diperkirakan mencapai total keuntungan pendapatan ilegal sekitar 150 *Milyar US Dollar*, kedua memiliki keuntungan sekitar 46.9 *Milyar US Dollar* per tahun. Dari data di atas bahwa Negara – Negara di Asia dan Negara maju adalah dua faktor pendukung besarnya rata rata keuntungan pendapatan eksploitasi seluruh dunia.

Oleh sebab itu Negara Asia sangat di gandrungi para pelaku perdagangan manusia, dimana para pelaku juga mudah mendapatkan dan menyelundupkan korban Karena di kawasan Asia sendiri terutama di kawasan Asia tenggara, kebanyakan masyarakatnya masih memiliki pendidikan yang kurang dan minim akan pengetahuan tentang perdagangan manusia dan juga batas Negara di kawasan Asia Tenggara msih tergolong kurang dalam pengamanannya.

Tabel 3. Data keuntungan eksploitasi manusia tiap sektor dari tiap korban

(US Dollar)

Sektor eksploitasi	Keuntungan
Eksploitasi seksual	21. 800
Eksploitasi buruh (di luar pekerja rumah tangga)	4.800
Agrikultur	2.500
Pekerja rumah tangga	2.300

Sumber : Organisasi Buruh Internasional pada *International Labour Organization Report, Profits, and Proverty : The Economic of Forced Labour 2014*

Menurut Organisasi Buruh Internasional pada *International Labour Organization Report, Profits, and Proverty : The Economic of Forced Labour 2014*, Dalam data di atas keuntungan tertinggi yang di dapatkan dari eksploitasi manusia ialah berasal dari sektor eksploitasi seksual dan di lanjutkan eksploitasi buruh. Dimana pada data tabel di atas menuliskan bahwasanya pada sektor eksploitasi seksual itu mendapatkan keuntungan sebesar 21. 800 US Dollars dan memiliki selisi jauh sekitar 16.000 US Dollars dari eksploitasi buruh, Agrikultur dan rumah tangga (ILO, 2014).

Kasus eksploitasi yang terjadi seperti data di atas ialah salah satu kasus perdagangan manusia, seperti halnya di Thailand pada tahun 2009

sampai dengan 2019 dalam laporan tahunan Thailand Anti – perdagangan manusia menyatakan eksploitasi migran ilegal yang bekerja di Thailand rata rata kebanyakan dari Negara Myanmar, Malaysia, Tiongkok dan Negara – Negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Negara Thailand.

Dalam laporan tahunan Pemerintah Kerajaan Thailand terkait anti – perdagangan manusia dalam kasus TIP (*Trafficking in Persons*) di industri prostitusi merupakan kasus yang paling umum di dapatkan di Thailand mengikuti kasus – kasus lainnya seperti, penjualan obat – obatan terlarang, imigran ilegal, eksploitasi pekerja ilegal, perdagangan manusia dalam penjualan organ tubuh secara ilegal dan lain lain.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN *ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS ESPECIALY WOMEN AND CHILDREN* DI THAILAND PADA TAHUN 2018 – 2019

A. Upaya yang dilakukan pemerintah Thailand dalam menerapkan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons especially Women and Children* untuk menangani kasus perdagangan manusia di Thailand pada tahun 2018 -2019

Perdagangan manusia menurut *ASEAN Convention Against Trafficking in Thailand Especially Women and Children* merupakan perekrutan, peangkutan, pengiriman, menyembunyian atau penerimaan orang dengan ancaman atau berupa bentuk kekerasan, memanfaatkan dan memiliki kendali atas seseorang, mengeksploitasi seseorang (Caballero-Anthony & Gong, 2020).

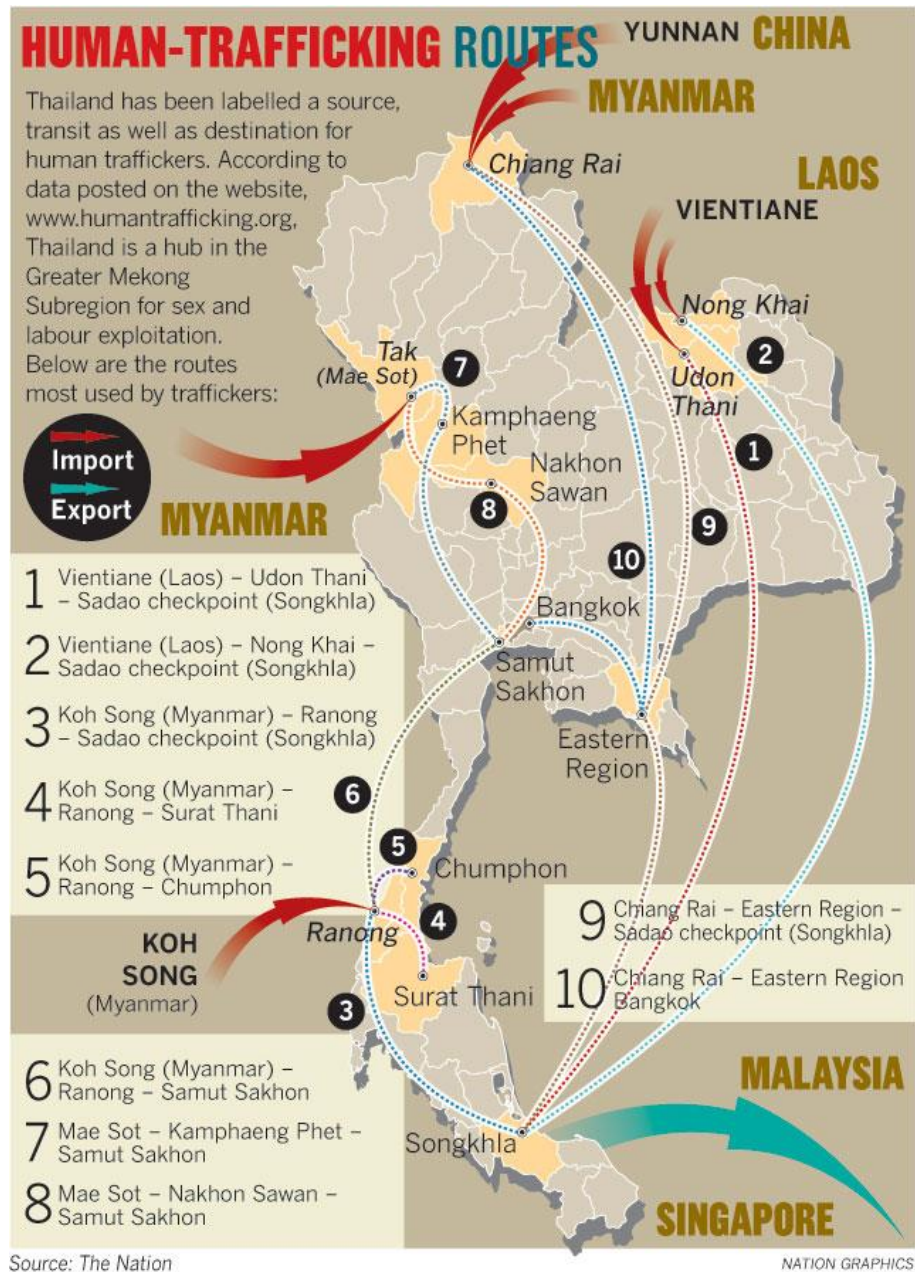
Seluruh Negara – Negara di kawasan Asia Tenggara ialah Negara – Negara berkembang kecuali Singapura, meskipun begitu Singapura juga tidak luput dari kasus perdagangan manusia dari data tabel 1 bahwa Singapura memiliki 200 kasus terkait perdagangan manusia dan yang berada di peringkat pertama dengan 1.899 kasus ialah Negara Thailand.

Thailand juga merupakan Salah satu Negara berkembang yang menjadi pemasok dan sentral perdagangan manusia dan tempat rumah singgah bagi korban terkait isu *Trafficking in Persons* di kawasan Asia Tenggara karena kondisi geografis negaranya.

Dari sejarah Negara Thailand itu sendiri sejak pada zaman Thailand masih di sebut kerajaan Siam, Thailand tidak bisa terlepas dari bisnis perdagangan manusia bahkan masyarakat Thailand disebut sebagai masyarakat budak . Menurut indeks perbudakan global, Thailand adalah tempat atau rumah bagi 610.000 korban perdagangan manusia dengan populasi Thailand sekitar 69, 428, 520 dan GDP 17. 910 US Dollars pada saat ini.(*Global Slavery Index*, 2019).

Sebagian besar Negara – Negara Asia masuk dalam Tier 2 dan Tier 3 dalam kasus perdagangan manusia, salah satunya Thailand berada di tingkat ke – 2 dikenal sebagai Negara tempat persinggahan bagi perdagangan manusia, terutama pada Negara – Negara tetangganya. Di bawah ini aka nada gambar peta Thailand terkait keluar – masuknya perdagangan manusia .

Gambar 2. Rute Keluar – masuknya perdagangan manusia di negara thailand dari – ke negara – negara lainnya.



Berikut gambar peta di atas terkait keluar – masuknya perdagangan manusia dan rute yang paling sering digunakan oleh para pelaku perdagangan manusia untuk menyelundupkan korban *trafficking*,

dimana pada peta di atas tergambar bahwa geografis Thailand merupakan pusat kawasan Asia tenggara, di bagian samping kanan dan kirinya terdapat Negara Laos, Kamboja dan Myanmar sedangkan di bagian bawah terdapat Negara Singapura maupun Malaysia dan di atas juga terdapat Tiongkok.

Para gambar peta di atas menjelaskan bahwa Negara Thailand merupakan sumber transit dari beberapa Negara lain baik dari Negara kawasan Asia Tenggara itu sendiri bahkan dari kawasan lain juga berbatasan langsung dengan Negara Thailand dan juga Thailand merupakan pusat sub – kawasan Mekong yang besar untuk eksploitasi seks dan tenaga kerja .

korban dari Negara Laos maupun Myanmar sendiri masuk dan singgah di beberapa kota di Thailand, yakni seperti di kota Udon Thani, Nongkhai, Ranong, Chumphon, Samut Sakhon dan juga Eastern Region yang perjalanannya akan berakhir pada Sadao Checkpoint atau Songkhla.

Berbagai program - program dan kebijakan yang berdasar hukum terkait Anti – perdagangan manusia telah dilakukan Thailand, bahkan dari tahun 1960 Thailand telah mencetuskan undang – undang pencegahan dan pendiskriminasian prostitusi. Setelah tiga puluh enam tahun kemudian Thailand mengeluarkan lagi undang undang untuk memperbaharui undang undang yang ada pada tahun 1960 yaitu undang – undang pencegahan dan pemberantasan prostitusi pada tahun 1996. Lalu setelah dua tahun kemudian yaitu pada tahun 1998, Thailand mengesahkan undang undang

Perlindungan Tenaga Kerja yang mengatur perlakuan setara antara karyawan pria dan wanita. Pada tahun 2008, Thailand mengesahkan Anti – *Trafficking in Persons Act*, undang-undang tersebut yang berisi mengkriminalisasi perdagangan manusia dan menyediakan segala sesuatu bagi korban perdagangan manusia.

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Thailand, Salah satunya kebijakan terkait perdagangan manusia yang telah dikemukakan oleh pemerintah Thailand ialah tidak memberikan toleransi apapun bagi pelaku perdagangan manusia. Salah satu bentuk kebijakan perdagangan manusia, ialah

Mengikuti UU Anti-TIP, Thailand telah menerbitkan Strategi dan Tindakan Kebijakan Nasional untuk Mencegah dan Menekan *Trafficking in Persons*. Khusus untuk anak-anak, Thailand mengamandemen KUHAP pada tahun 1999 dan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2003 untuk memasukkan ketentuan untuk menunjukkan lebih banyak kelonggaran dan kasih sayang bagi anak-anak. Juga pada tahun tersebut Thailand menyusun Undang-Undang Perlindungan Saksi untuk memberikan perlindungan bagi semua saksi yang membutuhkannya.

Tidak hanya sampai dengan undang - undang, usaha yang telah dilakukan pemerintah Thailand dalam menangani kasus perdagangan manusia di negaranya ialah dengan melakukan kerjasama internasional ataupun regional kepada Negara – Negara yang berkaitan, pembuatan MOU maupun kerjasama Organisasi Internasional seperti Organisasi

Buruh Internasional (ILO), UNIAP (*United Nation Inter Agency Project On Human Trafficking*) (Arby, n.d.) dan menandatangani maupun meratifikasi protokol atau perjanjian yang berdasar hukum dengan bersifat terikat, seperti halnya pada ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children.

Pada tanggal 25 July 2014, telah di ketahui bahwasanya Pemerintah Thailand telah meratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Thailand Especially Women and Children telah siap satu langkah lebih dekat ke pemberlakuan konvensi yang akan berlaku setelah setelah ratifikasi ACTIP (*ASEAN Convention Against Trafficking in Thailand Especially Women and Children*) oleh ke enam anggota ASEAN.

Di dalam konvensi ACTIP pada artike ke 11 : *Prevention of Trafficking in Persons*. Menyatakan bahwa para pihak yang telah meratifikasi diwajibkan untuk membuat kebijakan atau metode lainnya dan juga membuat dan membentuk terkait perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak.

Dalam menerapkan ASEAN *Convention Against Trafficking in Thailand Especially Women and Children*, Thailand telah melakukan program program terkait perdagangan manusia dan juga bekerjasama dan membentuk organisasi di dalam internalnya. Dalam *Royal Thai Government's Country Report on Anti – Human Trafficking Efforts* pada 01 Januari 2018 sampai dengan 30 Desember 2019 dalam laporan tersebut

Thailand telah membentuk organisasi dalam menerapkan ACTIP (*Royal Thai Government 's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts, 2019*) yakni :

1. Thailand *Anti – Trafficking in Persons Task Force* (TATIP)

Pada tahun 2018 TATIP di bentuk dengan mengeluarkan budget 3, 614,040 THB setara dengan 113, 292. 79 USD, dengan mengawali 29 kasus dan memmberikan bantuan sekitar 48 korban lalu telah menuntut 69 pelaku.

2. Thailand *Internet Crimes against Children Task Force* (TICAC)

Pada tahun 2018 TICAC mengungkap 124 kasus yang di antaranya ada kasus kekerasan seksual, kasus pelecehan seksual anak, dan kasus anak materi pornografi.

3. Child Advocay Centre (CACs)

Pusat Advokasi Anak (CAC) yang ke empat dan yang ke lima didirikan di Provinsi Ubon Ratchathani dan Kanchanaburi. Itu CAC telah berkontribusi pada peningkatan kapasitas petugas dalam melakukan identifikasi pendekatan yang berpusat pada korban, memungkinkan membangun kepercayaan dan lebih dekat kerjasama dengan korban dalam proses peradilan.

Dan pada tahun 2019 CACs berkolaborasi dengan NGO lainnya, dan bekerja sama bersama dengan TICAC dan TATIP

dalam perlindungan korban dan menuntut pelaku perdagangan manusia.

Hasil kegiatan dan tugas CACS (*Child Advocacy Centre Thailand*) antara 1 Januari sampai dengan 3 Desember 2019 akan di jabarkan di bawah ini :

1. *Meetings of Relevant Officers* : sudah di laksanakan rapat sebanyak 123 rapat, yang dilaksanakan rapat di Chiang Mai sebanyak 3 kali rapat, di Pattaya 17 kali, Phuket 5 kali, di Ubon Ratchathan 22 kali, Kanchanaburi 76 kali.
2. *Provision of training programmes for relevant officers at CAC* : sudah di lakukan sebanyak 66 kali. Yang dilaksanakan di kota Pattaya sebanyak 3 kali, di Phuket sebanyak 5 kali, di Ubon Ratchathan sebanyak 2 kali, di Kanchanaburi sebanyak 56 kali.
3. *Provision of consultation or suggestion to Assist Children* : sudah di lakukan sebanyak 740 kali. Yang dilaksanakan di kota Chiang Mai sebanyak 256 kali, Pattaya sebanyak 395 kali, di Phuket sebanyak 37 kali, di Ubon Ratchathan sebanyak 12 kali, di Kanchanaburi sebanyak 40 kali.
4. *Support and Assistance to case investigation* : sudah di lakukan sebanyak 87 kali. Yang dilaksanakan di kota Chiang Mai sebanyak 54 kali, Pattaya sebanyak 14 kali, di Phuket sebanyak 6 kali, di Ubon Ratchathan sebanyak 3 kali, di Kanchanaburi sebanyak 10 kali.
5. *Victim Assitance* : total bantuan sebanyak 104 korban dengan 80 kasus. Yang terdapat di kota Chiang Mai sebanyak 48 korban dari 45

kasus, Pattaya sebanyak 30 korban dari 19 kasus, di Phuket sebanyak 10 korban dari 3 kasus, di Ubon Ratchathan sebanyak 3 korban dari 3 kasus, di Kanchanaburi sebanyak 13 korban dari 10 kasus.

6. *Reception to domestic groups of study visits* : sudah di lakukan sebanyak 104 kali. Yang dilaksanakan di kota Chiang Mai sebanyak 61 kali, Pattaya sebanyak 9 kali, di Phuket sebanyak 8 kali, di Ubon Ratchathan sebanyak 8 kali, di Kanchanaburi sebanyak 18 kali.
7. *Reception to foreing groups of study visits* : sudah di lakukan sebanyak 115 kali. Yang dilaksanakan di kota Chiang Mai sebanyak 9 kali, Pattaya sebanyak 12 kali, di Phuket sebanyak 53 kali, di Ubon Ratchathan sebanyak 2 kali, di Kanchanaburi sebanyak 9 kali.
8. *Provision of prevention Activities for children* : sudah di lakukan sebanyak 25 kali. Yang dilaksanakan di kota Chiang Mai sebanyak 94 kali, Pattaya sebanyak 19 kali, di Phuket sebanyak 25 kali, di Ubon Ratchathan sebanyak 23 kali, di Kanchanaburi sebanyak 90 kali.
9. *Children Assistance* : sudah di lakukan sebanyak 85 kali. Yang dilaksanakan di kota Chiang Mai sebanyak 10 kali, Pattaya sebanyak 15 kali, di Phuket sebanyak 34 kali, di Ubon Ratchathan sebanyak 10 kali, di Kanchanaburi sebanyak 16 kali.
10. *Children home visiting programmes* : sudah di lakukan sebanyak 1972 kali. Yang dilaksanakan di kota Chiang Mai sebanyak 114 kali, Pattaya sebanyak 137 kali, di Phuket sebanyak 13 kali, di Ubon Ratchathan sebanyak 2 kali, di Kanchanaburi sebanyak 1706 kali.

11. *Bringing children/victims to attend trials and or preparing them to testify* : sudah di lakukan sebanyak 21 kali. Yang dilaksanakan di kota Chiang Mai sebanyak 7 kali, Pattaya sebanyak 4 kali, di Phuket sebanyak 2 kali, di Ubon Ratchathan sebanyak 6 kali, di Kanchanaburi sebanyak 4 kali.

12. *Victim repatriation* : total pemulangan korban sebanyak 5 korban, yang terdapat di kota Pattaya 5 orang.

Rencana TICAC dalam memperluas jaringan CACS di Thailand melalui kerjasama dengan dua LSM, yaitu *Rapha House* dan *Zoe International* di Chiang Mai, dalam membangun tempat penampungan CAC dan meningkatkan perawatan dan perlindungan bagi anak – anak korban perdagangan (*Royal Thai Government 's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts, 2019*).

Ke - tiga organisaisi internal ini yang dibawah langsung dan di bentuk oleh pemerintah Thailand telah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam menyelamatkan korban perdagangan manusia.

Pemerintah Thailand juga telah melakukan kerjasama kepada Negara – Negara yang berkaitan langsung dengan permasalahan perdagangan manusia di negaranya. Seperti Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Tiongkok, Jepang, Australia, Amerika Serikat dan Belanda.

Sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2019, pemerintah Thailand melakukan langkah langkah pro aktif dalam menyelidiki, menangkap, dan mengadili pelaku perdagangan manusia. Upaya yang impactnya lebih besar juga

telah dibuat oleh pemerintah Thailand untuk menargetkan dan menindak jaringan perdagangan manusia dan juga menangkap komplotan pelaku yang bekerja sama dengan orang-orang yang berpengaruh dan sindikat terorganisir transnasional.

Menurut laporan Thailand terhadap Trafficking in Persons, yakni langkah-langkah di bawah ini memberikan efek penurunan kasus perdagangan manusia di Thailand pada tahun 2018 – 2019 :

1. Hukum dan aparat penegak hukum telah diperkuat dan diperketat dalam menangkap dan mengadili pelaku dan juga melindungi korban perdagangan manusia.
2. Efisiensi penuntutan terhadap pelaku di tingkatkan di semua langkah dari proses peradilan.
3. Pengadilan Kehakiman telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa perdagangan manusia agar memberikan rasa takut terhadap pelaku lain.
4. Tindakan proaktif dilakukan untuk menyelidiki dan menangkap orang-orang berpengaruh atau pejabat di dalam Thailand untuk di tindak lanjuti. Pejabat yang terkait dan ikut bekerja sama terhadap pelaku perdagangan manusia akan dijerat hukum pidana dan juga harta mereka akan disita.
5. Peningkatan pada kapasitas aparat penegak hukum melalui analisis rencana pelanggaran (modus operandi) dan menerbitkan berbagai macam buku pedoman dalam penanganan kasus perdagangan manusia yang koherensif, dan juga menyelenggarakan seminar dan lokakarya

- antar instansi pemerintah, swasta organisasi dan LSM tentang topik-topik seperti undang-undang yang terkait dengan perdagangan manusia
6. Instansi pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil terus bekerjasama.
 7. Pemerintah memberikan perlindungan saksi dan bantuan kepada korban perdagangan manusia untuk menuntut ganti rugi. Berbagai bentuk bantuan yang telah dilakukan pemerintah kepada para korban ialah dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan kepercayaan baik ke diri sendiri maupun ke orang lain, mengurangi rasa takut dan mengajak kerjasama dalam menyelidiki pelaku perdagangan manusia.
 8. Sepanjang 2018 dan tahun di atasnya instansi pemerintah Thailand memperkuat kemitraan dengan negara tetangga dan mitra internasional dengan melakukan Pertemuan bilateral di dampingi lembaga penegak hukum di ASEAN.

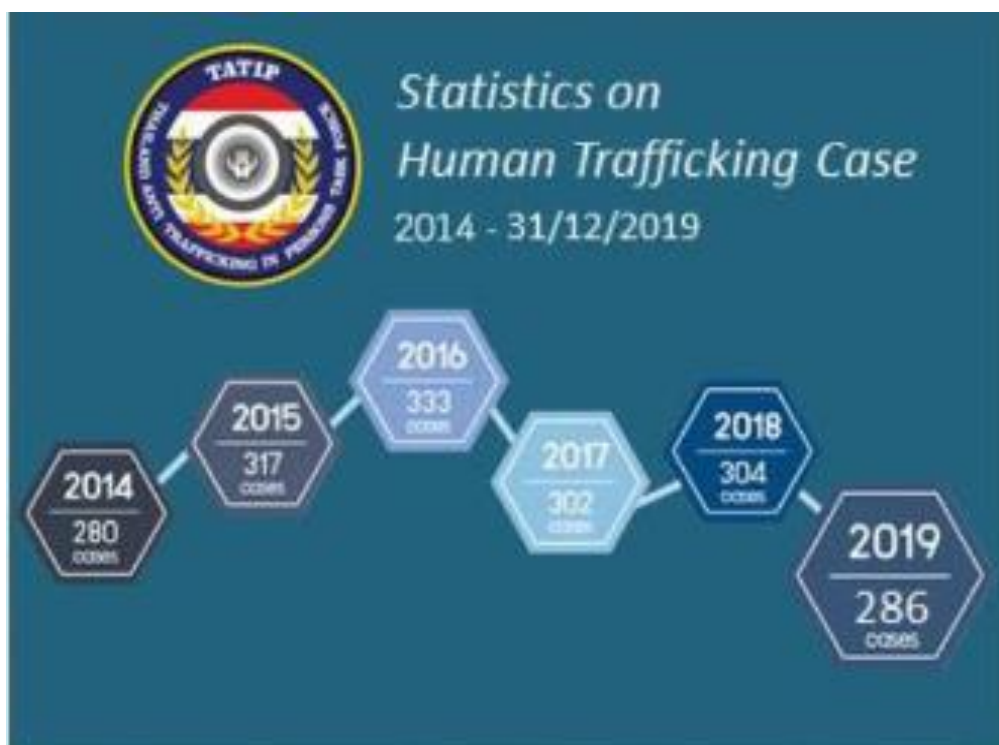
Di dalam Laporan *Royal Thai's Government* pada perdagangan manusia terdata bahwa terdapat penurunan angka setelah tahun di ratifikasinya ASEAN *Convention Against Trafficking in Thailand Especially Women and Children*. Baik dalam penyelamatan korban maupun perlindungan bakal korban perdagangan manusia.

Total kasus perdagangan manusia Pada tahun 2018 sampai dengan 2019 ialah sebesar 590 kasus, dimana 590 kasus ini perdagangan manusia dalam

industri prostitusi (*Sex Trafficking*) menjadi kasus yang paling banyak ditemukan di Thailand.

Berikut statistik gambar yang akan penulis paparkan terkait *Sex Trafficking* (perdagangan manusia) pada tahun 2018 – 2019 :

Gambar 3. Statistik Kasus Perdagangan Manusia.



Sumber : laporan pemerintah Kerajaan Thailand dalam kasus Anti – Perdagangan manusia pada tahun 2014 – 2019

Dari gambar di atas kasus perdagangan di Thailand sejak tahun setelah di ratifikasinya ACTIP yaitu pada tahun 2015 mengalami penurunan terutama pada tahun 2018 ke 2019 yang berkurang sebanyak 18 kasus, di bandingkan pada tahun 2017 – 2018. Secara khusus faktor yang terjadi terhadap penurunan dalam kasus perdagangan manusia di Thailand ini ialah adanya peningkatan kesadaran dan

mencegah korban dari perdagangan manusia. Dan juga Peningkatan kapasitas TICAC, TATIP, CAC dan LSM maupun organisasi yang bekerja sama dengan Negara Thailand. dan memungkinkan lebih banyak identifikasi dan litigasi kasus perdagangan manusia yang terkait dengan anak seperti pornografi dan bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak lainnya. Adapun penangkapan dalam kasus kerja paksa dan bentuk-bentuk terkait perdagang manusia lainnya merupakan hasil dari upaya yang terus di lakukan pemerintah dan organisasi regional Thailand.

Berikut data terkait bentuk – bentuk aktivitas perdagangan manusia pertahun :

Table 4. kasus perdagangan manusia

Bentuk bentuk perdagangan manusia	2016	2017	2018	2019
Prostitusi	244	246	249	157
Pornografi	3	7	4	15
Bentuk eksploitasi seksual lainnya	-	2	5	12
Pemaksaan mengemis	8	26	8	8

Perbudakan	-	-	-	33
Buruh	32	14	29	31
Perikanan	43	7	6	4
Pemerasan dll	3	-	3	26
total	333	302	304	286

Sumber : Royal – Thai Government Report 2019

dari data di atas bahwanya setelah Thailand melakukan ratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) dari tahun 2019 sampai dengan 2020 terdapat total 1.225 angka kasus perdagangan manusia di Thailand, dan adapun bentuk bentuk perdagangan manusia di dalamnya seperti prostitusi, pornografi, bentuk lain dari eksploitasi seksual, pemaksaan untuk mengemis, perbudakan, buruh, eksploitasi di bidang perikanan, dan lain lain. Dari bentuk aktivitas perdagangan manusia yang terdata, perdagangan manusia di bidang prostitusi memiliki angka yang paling besar, bisa disimpulkan bahwa perdagangan manusia di bidang prositusi merupakan bisnis yang cukup eksis.

Menurut laporan tahunan negara Thailand terkait Perdagangan manusia ialah terdapat Sebanyak 286 kasus perdagangan manusia di Thailand pada tahun 2019, yang telah di verifikasi berdasarkan bentuk – bentuk perdagangan manusia itu ada 184 kasus adalah perdagangan seks dan dari ngk tersebut ternyata diketahui bahwa terjadi penurunan dari tahun 2018 sebesar 74 kasus atau 28,8 persen.

Pada tahun 2019 terdapat sebanyak 552 orang pelanggar perdagangan manusia (328 laki-laki dan 224 perempuan) ditemukan dan telah di tangkap. Sementara orang Thailand (400 orang) tetap menjadi mayoritas pelanggar, jumlah mereka menurun dari 2018 sebesar 5,66 persen karena penurunan dalam kasus prostitusi, di mana orang Thailand biasanya terlibat sebagai pelaku utama.

Namun demikian di saat yang sama jumlah pelanggar perdagangan manusia yang ternyata merupakan warga Negara asing meningkat secara substansial dari tahun 2018 sampai pada tahun 2019. Berikut data statistik terkait penangkapan pelaku perdagangan manusia beserta Negara asalnya :

Tabel 5. Angka pelanggar perdagangan manusia

	2016	2017	2018	2019
(Gender)				
Male	265	145	229	328
(Gender)				
Female	335	282	303	224
Thailand	462	361	424	400
Myanmar	35	9	30	120
Kamboja	26	25	15	3
Laos	41	3	4	6

Dll	36	29	59	23
Total	600	427	532	552

Sumber : *Thailand's Country Report on Anti Human Trafficking Response .2019*

Dari data tabel di atas pada laporan anti perdagangan manusia negara Thailand pada tahun 2019, ditemukan ada banyak pelanggar perdagangan manusia atau pelaku dari berbagai negara selain dari negara Thailand itu sendiri, dan pelaku dari negara Thailand memiliki angka yang paling tinggi. Adapula di bawah ini, merupakan tabel data korban yang diselamatkan menurut laporan tahunan negara Thailand.

Tabel 6. Data korban yang diselamatkan dari perdagangan manusia

	2016	2017	2018	2019
(Gender) Male	411	88	282	1157
(Gender) Female	413	367	349	661
Thailand	333	327	345	251
Myanmar	238	53	205	1306
Kamboja	52	26	28	94

Laos	58	30	14	37
DII	143	19	39	130
Total	824	455	631	1818

Sumber : *Thailand's Country Report on Anti Human Trafficking Response .2019*

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian utama pemerintah Thailand di tahun 2018 – 2019 dalam memberantas bentuk perdagangan manusia memberikan hasil yang sesuai dengan target pemerintah Thailand dalam menurunkan angka kasus dan menyelamatkan korban perdagangan manusia, apalagi kita bisa lihat mulai dari 2016 angkanya semakin menunjukkan hasil, bahwa Thailand setelah meratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especialy Women and Children* telah berlangsung baik, walaupun masih ada proses yang belum terjalani tetapi tetap membuahkan hasil.

Berikut perkembangan kasus perdagangan manusia yang ditangani oleh petugas penyidik pemerintah Negara Thailand :

Tabel 7. Perkembangan kasus perdagangan manusia yang ditangani oleh petugas penyidik

Tahun	total	Under inquiry	Filed to public presecutors	<i>Not filed to public presecutors</i>
2016	333	0	329 (98.80%)	4 (1.20 %)
2017	302	1 (0.33%)	298 (98.68%)	3 (0.99%)
2018	304	4 (1.32%)	298 (98.03%)	2 (0.66%)
2019	286	78 (27.27 %)	208 (72.73 %)	0

Sumber : *Thailand's Country Report on Anti Human Trafficking Response* .2019

Pada data tabel di atas tahun 2019, sebanyak 286 kasus perdagangan manusia yang telah di tangani oleh petugas penyidik Thailand. Penyelidikan yang telah selesai untuk 208 kasus (72,73 %) . dan semua kasus yang diselesaikan diajukan ke jaksa penuntut umum. Sisanya 78 kasus (27,27 %) sedang dalam pemeriksaan penyidik.

Pada tahun 2019. Departement Litigasi Perdagangan manusia dari *Official Airline Guide* (OAG) menerima total 364 kasus perdagangan

manusia dari petugas penyelidikan di seluruh Negara Thailand. Diklasifikasikan berdasarkan jenis eksploitasinya , 242 kasus adalah eksploitasi seksual, tujuh kasus pengemis paksa dan 115 kasus kerja paksa atau jasa. Khususnya, kasus kerja paksa atau layanan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum meningkat dari tahun 2018 sebesar 57 kasus atau 101,75 %. Berikut detail klasifikasi kasus berdasarkan jenis eksploitasi :

Tabel 8. Klasifikasi kasus berdasarkan jenis eksploitasi.

Jenis Eksploitasi	2016	2017	2018	2019
Prostitusi, materi, pornografi, produksi dan distribusi, dan bentuk lain dari perdagangan seks	335	325	286	242
Mengemis secara paksa	13	25	14	7
Kerja paksa atau layanan atau bentuk serupa dari eksploitasi /perbudakan atau praktik serupa	135	68	57	115
Total	483	418	357	364

Sumber : *Thailand's Country Report on Anti Human Trafficking Response*
.2019

Dari data di atas jenis eksploitasi yang memiliki angka tertinggi tiap tahunnya masih berada pada jenis eksploitasi terkait prostitusi,

pornografi dan bentuk lainnya dari perdagangan seks. Dan diikuti oleh eksploitasi perbudakan atau mungkin seperti eksploitasi tenaga kerja.

Walaupun pemerintah Thailand dalam menangani masalah perdagangan manusia tidak hanya di bantu oleh dengan isi konvensi ACTIP atau dengan perjanjian *ASEAN Convention Against Trafficking in Thailand Especially Women and Children* saja, tetapi peran antar – Negara, NGO, dan Organisasi yang mereka bentuk sendiri sungguh membantu dalam pencapaian pemerintah Thailand yakni penurunan dalam kasus perdagangan manusia. Namun demikian, itu juga salah satu pengaruh dari konvensi ACTIP yang menyatakan bahwasanya di perlukan peningkatan kerjasama di bidang apapun dalam menyelesaikan masalah tersebut. baik kerjasama antar regional maupun internasional.

B. Efektivitas *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons especially Women and Children* dalam mengurangi perdagangan manusia di Thailand pada tahun 2018 – 2019

ASEAN merupakan salah satu organisasi regional yang berada di kawasan Asia Tenggara, atau juga di sebut sebagai Perserikatan Bangsa – Bangsa di kawasan Asia Tenggara, yang terbentuk pada tahun 1967 dan memiliki anggota dair 10 negara, yaitu : Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Dimana ASEAN mempunyai tujuan dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan, serta meningkatkan kerjasam ekonomi antar – Negara kawasan Asia Tenggara dan memperbaiki daya saing regional (ASEAN, n.d.).

Di dalam kasus perdagangan manusia ASEAN Telah membuat konvensi terkait *Trafficking in Persons Especially women and Children*, yaitu *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons especially Women and Children* (ACTIP) yang merupakan sebuah konvensi ASEAN dalam menjadi alat bantu atau instrument yang berdasar dan berlandaskan hukum yang terikat kepada Negara – Negara yang telah menandatangani dan meratifikasi berbasis di kawasan Asia Tenggara dalam fokus permasalahannya ialah pada kasus perdagangan manusia.

Negara – Negara di kawasan Asia Tenggara hampir semuanya memiliki kasus terkait perdangan manusia. Dan Negara terbesar yang menjadi pusat dan tempat singgah pada kasus perdagangan manusia ialah salah satunya itu Negara Thailand. Karea di Negara Thailand memiliki letak geografis yang lumayan bagus dalam pemindahan korban perdagangan manusia.

Negara Thailand sendiri telah melakukan penandatanganan dan telah meratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons especially Women and Children* pada July 2014. Di tahun 2015 thailand gigih dan menaati aturan dalam menerapkan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons especially Women and Children* di negaranya, terbukti pada angka penurunan pada laporan tahunan Pemerintah Kerajaan Thailand yang selalu terupdate dan dapat di lihat secara umum melalui laman Thailand dan ASEAN sendiri.

Kita ketahui bahwa *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons especially Women and Children* ialah berupa instrument atau bentuk perjanjian terikat yang berdasarkan hukum yang wajib di patuhi. Dimana, isi dalam *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons especially Women and Children* menjelaskan bahwa pihak yang telah menandatangani dan meratifikasi ACTIP diwajibkan membuat kebijakan dan program program terkait kasus *Trafficking in Persons especially Women and Children*.

Negara Thailand sendiri telah membuat banyak kebijakan, program – program dan perundang – udangan terkait kasus perdagangan manusia baik sebelum Thailand meratifikasi ACTIP bahkan setelah meratifikasi ACTIP. Dan Negara Thailand juga sudah memperbaiki sisem – sistemnya dan mengubah ke sistem yang baru guna memberikan semangat baru dalam memberantas perdagangan manusia. Juga Negara Thailand selalu meningkatkan kerjasama kepada Negara – Negara seekitar dan yang berhubungan langsung dari Negara yang menjadi korban maupun yang menjadi pelaku perdagangan manusia.

Penerapan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons especially Women and Children* di Thailand pada tahun 2018 – 2019 bisa di bilang cukup berhasil, pertama di lihat dari laporan tahunan yang dimiliki pemerintah Thailand dan lalu ke pihak ASEAN, itu angka penurunan terhadap kasus perdagangan manusia menjadikan alasan utama kenapa penerapan ACTIP itu berhasil.

Kedua pemerintah Thailand telah mengikuti dengan taat dalam menerapkan ACTIP, dimana mereka tiap tahun selalu memberikan laporan terupdate terkait perdagangan manusia di negaranya mulai dari 2014 – 2019 .

Ketiga mereka mengikuti tahap – tahap dan aturan dalam ASEAN *Convention Against Trafficking in Thailand Especially Women and Children*, dengan meningkatkan kerjasama internasional antar – Negara atau bahkan dengan *Non – Government Organization* (NGO), berikut salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan Negara Thailand dalam kerjasama memberikan akses yang lebih besar bagi pekerja Thailand yang tertarik bekerja di luar negeri.

Oleh dengan itu *Ministry of Labour* mendirikan kantor administrasi ketenagakerjaan luar negeri Thailand (TOEA) di sepuluh provinsi di seluruh Thailand untuk memberikan pintu besar agar akses tenaga kerja Thailand dapat bekerja di luar negeri secara legal dan kantor dapat yang di buat ini pula dapat membantu pekerja Thailand yang tertarik bekerja di luar negeri, termasuk penempatan kerja dan pemeriksaan kesehatan. Berikut detail data ketenagakerjaan luar negeri melalui program yang didukung pemerintah :

Tabel 9. Ketenagakerjaan luar negeri melalui program yang didukung pemerintah

No.	Tujuan	orang	Perbandingan biaya		Biaya berkurang	Total penurunan (THB/orang)
			Oleh pemerintah (THB/Orang)	Oleh sektor swasta (THB/Orang)		
1.	Israel	5.948	79.328	300.000	220.672	1.312.557.056
2.	Republik Korea	5.246	20.244	180.000	159.756	838.079.976
3.	Jepang	430	15.000	300.000	285.000	122.550.000
4.	Taiman	153	15.000	120.000	105.000	16.065.000
5.	Malaysia	14	7.000	25.000	18.000	252.000
6.	Singapura	93	5,000	9,000	4.000	372.000
7.	United Arab Emirates	2	4.000	25.000	21.000	42.000
Total		11. 886			2.289.918.032	

Sumber : *Thailand's Country Report on Anti Human Trafficking Response*

.2019

Ministry Of Labour memberikan kursus orientasi dan pelatihan, termasuk resiko perdagangan manusia dan saluran bantuan bagi pekerja Thailand yang sedang mencari pekerjaan di luar negeri. Pada Tahun 2019 terdapat 4.803 pekerja yang berpartisipasi dalam kursus orientasi dan pelatihan di kantor ketenagakerjaan provinsi.

pemerintah Thailand juga membentuk organisasi regional dalam mendukung program dan kerja terkait perdagangan manusia. Bahkan pemerintah Thailand telah membuat sebuah aplikasi dalam menunjang kasus perdagangan manusia. Ada banyak kegiatan dan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Thailand bersama dengan NGO maupun organisasi – organisasi internal lainnya, meskipun hasilnya tidak 100 persen dalam menyelesaikan masalah akan tetapi tiap tahun setelah diratifikasinya *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons Especially Women and Childrens* ini termasuk membuahkan hasil dari jerih payah yang banyak, terutama pada melawan dan memerangi oknum keterlibatan pihak pemerintah Thailand itu sendiri, dan juga membuat aplikasi ‘ ‘ Protect – U ‘ ‘ bertujuan agar dapat memberikan perlindungan dan keselamatan cepat terhadap para korban perdagangan manusia.

Dalam laporan tahun pemerintah Thailand terkait perdagangan manusia tahun 2018 – 2019, pemerintah Thailand sudah memiliki perencanaan masa depan bagaimana melawan Perdagangan manusia di tahun selanjutnya. Terdapat perencanaan masa depan pemerintah Thailand ialah, dengan tetap berkoordinasi dan saling bekerjasama kepada negara

yang terlibat atau negara – negara di Kawasan Asia Tenggara contohnya : Laos, Kamboja, dll, tetap meningkatkan peran – peran organisasi internal maupun NG dan LSM lainnya, dan juga meningkatkan peroperasian aplikasi mobile” PROTECT – U ‘’ dalam bahasa Laos, Tagalog dll untuk meningkatkan perlindungan dari negara tetangga dan juga mempromosikan Kerjasama lebih lanjut antara kepolisian Kerajaan Thailand dan Lembaga penegak hukum negara lain untuk meningkatkan penyelidikan kasus peragangan manusia / kerja paksa yang melibatkan jaringan kejahatan transnasional, dan juga meningkatkan peran Thailand Anti – Trafficking In Person Task Force (TATIP) sebagai koordinator dalam mengumpulkan informasi terkait pemberantasan perdagangan manusia dalam lingkup internasional, mengingat semakin banyaknya kasus yang melibatkan kejahatan trnsnasional terorganisir.(*Royal Thai Government ’ s Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts*, 2019)

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang teroganzir dan memiliki banyak kasus di berbagai Negara dan membahayakan bagi seseorang dan juga memberikan ancaman keamanan bagi suatu Negara. Apalagi di saat Negara tersebut sudah dikenal sebagai tempat hiburan malam dan tempat seks terbesar di kawasan Asia Tenggara.

1. Upaya yang dilakukan pemerintah Thailand dalam menerapkan ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons especially Women and Children* ialah dengan membuat berbagai macam organisasi regional dalam membantu menyelamatkan korban perdagangan manusia dan menyikapi bakal korban perdagangan manusia, pemerintah Thailand juga berkoordinasi langsung dengan NGO lainnya, dan juga mengeluarkan pernyataan terkait tidak adanya toleransi dalam perdagangan manusia, dan juga membuat suatu kebijakan terkait perdagangan manusia yakni, salah satunya kebijakan 5p yaitu disebut *Policy, Prosecution, Prevention, Protection, dan Partnership*. Dan juga mengikuti berbagai macam konvensi – konvensi regional dan internasional

Menanggapi hal tersebut sejak mempromosikan pariwisatanya pemerintah Thailand juga tetap mencoba untuk menyelesaikan kasus

perdagangan manusia, seperti halnya membuat undang – undang dan memperbaruinya berkali kali dan melakukan kerjasama dan meratifikasi perjanjian terkait perdagangan manusia.

Salah satu konvensi yang sudah pemerintah Thailand ratifikasi ialah *ASEAN Convention Against Trafficking in Thailand Especially Women and Children*, dimana setelah meratifikasi konvensi tersebut. Perubahan dalam kasus perdagangan manusia sangat terlihat seperti penurunan dalam kasus perdagangan manusia semenjak satu tahun setelah ratifikasi di lakukan, terutama pada tahun 2018 – 2019. Penurunan kasus pada tahun tersebut sangat signifikan.

Dan juga Organisasi regional yang di bentuk pemerintah Thailand berhasil dalam menangani kasus perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak – anak. Dimana kita ketahui bahwa kebanyakan korban dari perdagangan manusia itu selalu tertuju pada perempuan dan anak – anak. Mungkin dari sekitar kasus perdagangan manusia hamper 90 persen berasal dari perempuan dan anak – anak.

2. Efektivitas *ASEAN Convention Against Trafficking in Thailand Especially Women and Children*

Keputusan pemerintah Thailand dalam meratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Thailand Especially Women and Children* bisa di bilang berhasil dengan merujuk laporan dan kinerja yang dilakukan pemerintah Thailand sudah sangat signifikan saat ini, dimana

diketahui bahwa dari tahun 2018 – 2019 penurunan sebanyak 28,8 persen di dalam kasus perdagangan manusia di Thailand.

Pemerintah Thailand juga sudah mengatur dan mempersiapkan perencanaan masa depan terkait melawan perdagangan manusia dengan masih tetap berkoordinasi dengan negara lain yang juga ikut terlibat dan juga meningkatkan aplikasi terkait perdagangan manusia yang mereka buat dan Kerjasama LSM maupun NGO dan masih banyak lain

Dalam hal ini, dengan Angka penurunan yang terjadi di Thailand pada kasus perdagangan manusia pada tahun 2018 – 2019 memberikan pandangan bahwa jika kita mengikuti aturan dan mempercayai suatu perjanjian, usaha – usaha yang kita lalui itu pasti akan mudah, seperti halnya yang di lakukan oleh pemerintah Thailand dalam menerapkan *ASEAN Convention Against Trafficking in Thailand Especially Women and Children*.

DAFTAR PUSTAKA

- 27th ASEAN Summit and Related Summits in Kuala Lumpur , Malaysia.* (n.d.).
<https://asean.mfa.go.th/en/content/66958-27th-asean-summit-and-related-summits-in-kuala-lumpur,-malaysia>
- Arby, D. (n.d.). *Upaya Uniap Dalam Menangani Human Trafficking di Thailand.* 2551(2008). <https://ecpat.org/story/trafficking-in-thailand-the-demand-fuels-child-trafficking-for-sexual-purposes/>
- Aronowitz, A. A. (n.d.). *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings (Global Crime and Justice).*
- ASEAN. (n.d.). *ASEAN (PERHIMPUNAN BANGSA BANGSA).*
<https://jakarta.diplo.de/id-id/themen/politik/-/1986362>
- Bakry, D. U. S. (2017). *Dasar - Dasar Hubungan Internasional Edisi pertama.*
- Barlow, H. D. (1984). *Introduction to Criminology.* Little Brown and Company.
- Caballero-Anthony, M., & Gong, L. (2020). Annex 2. ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children. In *Non-Traditional Security Issues in ASEAN* (pp. 301–335).
<https://doi.org/10.1355/9789814881098-012>
- Commer, P. J., Sci, S., Majeed, M. T., & Malik, A. (2017). Selling Souls: An Empirical Analysis of Human Trafficking and Globalization. In *Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences* (Vol. 11, Issue 1).
- Diantha, I. M. P., Putra, I. B. W., Landra, P. T. C., Palguna, I. D. G., Wisanjaya, I.